

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran, yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda, dan berbagai komponen bangsa lainnya. Mundurnya Presiden Soeharto ditengah krisis ekonomi dan moneter yang sangat memberatkan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi awal kelahiran reformasi di tanah air.

Untuk mewujudkan tujuan nasional yang menjadi harapan semua masyarakat indonesia, dibutuhkan sistem nilai budaya politik yang menjadi landasan bagi berlangsungnya sebuah tatanan negara yang dikehendaki oleh masyarakat itu sendiri. Sehingga apa yang dicita-citakan dapat terwujud sesuai dengan harapan reformasi.

Pasca tragedi 21 Mei 1998, ruh kampus dalam membangun perubahan dan menuntaskan agenda reformasi agaknya belum maksimal. Mahasiswa memang sebagai salah satu unsur terpenting dalam agenda perubahan tersebut, itu karena bibit kepentingan politik telah mendarah daging bahkan berakar bagi para aktivis kampus.

Di pentas sejarah panggung politik Indonesia, politik kampus menjadi sebuah keunikan tersendiri bagi sejarah perjalanan politik di Indonesia. Kentalnya budaya-budaya politik di arena nyata politik praktis indonesia sangat mempengaruhi budaya politik yang ada di kampus. Beginilah adanya, politik eksternal kampus sangat berpengaruh pada politik internal kampus. Bahkan kampus menjadi sasaran empuk untuk menjadi ladang kaderisasi partai politik atau organisasi-organisasi politik di eksternal kampus. Tidak dinafikan lagi

sebagai *miniature state* kampus menjadikan para penghuninya layaknya para negarawan yang piawai, birokrat ulung, bahkan koruptor kelas kakap.

Sebagai *miniatur state* kampus juga memiliki pemerintahan sendiri di kalangan mahasiswa atau disebut dengan *Student Government*. Namun sayang, ada satu titik yang belum bisa berjalan secara ideal sebagai sebuah pemerintahan kecil, di kampus tidak memiliki lembaga hukum yang sah untuk menindak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan para pemain di pemerintahan kampus. Sebagaimana ada di dalam pemerintahan yang sebenarnya yang dikenal dengan *trias political* yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di pemerintahan kampus belum ada lembaga yudikatif tersebut, akhirnya ada kepincangan untuk mencapai *Good Governance*. Itulah gambaran bagaimana politik kampus dan pemerintahannya berjalan dan beraktivitas.

Kampus sebagai unsur perubahan dan pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Sebagaimana fungsi serta peran mahasiswa sebagai *Agent Of Change*, maka untuk jangka yang cukup panjang mahasiswa, perubahan serta pembangunan akan lebih di titik beratkan pada gerakan dan kemandirian orang-orang yang lahir dari kampus, karena mereka bergerak atas dasar pemahaman, bukan taqlid buta walaupun juga banyak yang demikian. Saat ini mahasiswa-lah yang terus aktif mengontrol berjalannya pemerintahan dari sekian banyak unsur monitoring yang ada, maka dari sinilah akan lahir perubahan-perubahan yang diharapkan.

Mahasiswa selaku generasi kepemimpinan negara masa depan, merupakan aset penting yang paling berharga bagi sebuah negara. Hebatnya golongan mahasiswa akan menjanjikan mantapnya kepemimpinan akan datang, begitulah sebaliknya. Di Indonesia, sejarah pergerakan mahasiswa bukanlah perkara baru, sejak tahun 60-an hingga kini

banyak peristiwa penting yang berlaku sama ada di peringkat kebangsaan maupun antar bangsa yang melibatkan golongan mahasiswa. Penyertaan mahasiswa ini dilihat sebagai suatu yang positif menangani berbagai isu yang berlaku di dalam negara (Prasetyantoko, 2001: 141)

Visi politik serta orientasi masing-masing kesatuan aksi telah menjadikan gerakan mahasiswa tidak bisa dilihat sebagai identitas yang homogen. Terciptanya persatuan aksi mahasiswa dari berbagai elemen organisasi mahasiswa merupakan bukti bahwa mahasiswa tidak bisa dianggap remeh dalam dunia politik maupun dalam membawa aspirasi rakyat kecil. Hal tersebut terwujud dalam proses jatuhnya rezim orde baru yang dipelopori oleh mahasiswa dan setiap ada permasalahan yang merugikan rakyat, mahasiswa siap untuk membela dengan berunjukrasa demi tercapainya tujuan yang adil dan sesuai dengan amanah konstitusi.

Aktivis Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo mengharapkan adanya sebuah perubahan yang signifikan dalam penentuan kebijakan. Lahirnya sebuah kebijakan seharusnya dapat dimusyawarakkan secara bersama-sama, sehingga tidak terjadi kontroversi antara mahasiswa dan pihak birokrat kampus. Dengan demikian akan terwujud suatu budaya politik kampus yang sesuai dengan demokrasi dan reformasi yang kita junjung tinggi keberadaanya di negara indonesia.

Namun, kenyataan yang terjadi di Universitas Negeri Gorontalo, pihak lembaga selalu membatasi kegiatan-kegiatan yang berbentuk ke arah politik dengan membuat peraturan-peraturan yang tidak menguntungkan mahasiswa, contohnya dengan adanya upaya pelarangan pelaksanaan kegiatan organisasi mahasiswa yaitu “Baksos”, membatasi

waktu aktivitas mahasiswa sampai pada pukul 17.00 Wita, pernyataan pemberian sanksi *scorsing* terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi, serta merepresi nilai-nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang bersebrangan pemikiran dengan pihak lembaga, bahkan terobosan baru yang dilakukan oleh lembaga dengan merumuskan kebijakan perpanjangan SK bagi seluruh Organisasi Pemerintahan Mahasiswa (OPMAWA) yang merupakan disobediensi konstitusi Organisasi Pemerintahan Mahasiswa atau PD/PRT OPMAWA. Dengan alasan penataan organisasi dan penyesuaian Rancangan Bisnis Anggaran (RBA). Tampak jelas bahwa pihak lembaga merumuskan serta menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa di atas, tanpa melibatkan kelompok-kelompok mahasiswa yang tergabung pada organisasi pemerintahan mahasiswa itu sendiri.

Dengan melihat kondisi lembaga yang sedemikian rupa, terindikasi bahwa pihak lembaga melakukan upaya untuk menghilangkan budaya politik (*political culture*) di kampus Universitas Negeri Gorontalo. Menurut Muasik (2005:9) bahwa agar dapat diperoleh pola yang cukup tepat dan petunjuk yang relevan mengenai budaya politik, harus bertitik tolak pada beberapa indikator, yakni : pengetahuan, keterlibatan, penilaian dan kebebasan mahasiswa terhadap salah satu obyek pokok orientasi politik kampus. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengangkat judul ***“BUDAYA POLITIK KAMPUS” Studi Terhadap Aktivis Mahasiswa di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo.***

1.2 Identifikasi Masalah

1. Budaya politik yang dibahas dalam penelitian ini adalah budaya politik di kampus. Kegiatan politik mahasiswa dibatasi pada organisasi intra maupun ekstra yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa.
2. Untuk mengetahui budaya politik kampus, maka dilihat juga hambatan-hambatan pelaksanaan politik di kampus, serta bagaimana upaya untuk menghidupkan dan mempertahankan budaya politik di Universitas Negeri Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana budaya politik kampus yang terjadi di Universitas Negeri Gorontalo ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat kegiatan mahasiswa ke arah politik di kampus Universitas Negeri Gorontalo ?
3. Bagaimana upaya menghidupkan dan mempertahankan budaya politik di Universitas Negeri Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui budaya politik kampus yang terjadi di Universitas Negeri Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kegiatan mahasiswa ke arah politik di kampus Universitas Negeri Gorontalo.

3. Untuk mengetahui upaya menghidupkan dan mempertahankan budaya politik di Universitas Negeri Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut.

1.5.1 Manfaat teoritis.

1. Memberikan masukan dan sumbangsi pemikiran sebagai pembanding penemuan-penemuan peneliti terdahulu tentang pemahaman mahasiswa mengenai budaya politik kampus.
2. Dapat dijadikan referensi untuk pengembangan penelitian dan dasar atau acuan penelitian lain, khususnya penelitian mengenai budaya politik kampus.

1.5.2 Manfaat Praktis.

1. Masukan bagi Universitas Negeri Gorontalo khususnya pimpinan kampus untuk bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang berkaitan dengan mahasiswa.

Menambah pengetahuan tentang budaya politik kampus, dan mencegah kemungkinan timbulnya kontroversi antara pihak lembaga dan mahasiswa.